

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amsari, Feri, 2013, *Perubahan UUD 1945 : Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2004, "Mahkamah Konstitusi : Fenomena Hukum Tata Negara Abad XX" dalam Firmansyah Arifin, dkk, *Hukum dan Kuasa Konstitusi : Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-undang*, Rajawali Pers, Jakarta.

Atmadja, Arifin P. Soeria, 1986, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, PT Gramedia, Jakarta.

Bohari, H., 1995, *Hukum Anggaran Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hoesein, Zainal Arifin, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

H.R., Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ibrahim, Johnny, 2011, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu media Publishing, Jakarta.

Latif, Abdul, dkk, 2009, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta.

Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud M.D., 2009, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

S., Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1*, Kanisius, Yogyakarta.

- S., Maria Farida Indrati, 2013, *Ilmu Perundang-undangan 2*, Kanisius, Yogyakarta.
- Saidi, Muhammad Djafar, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Siahaan, Maruarar, 2011, *Hukum Acara mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 1997, *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Tim Penyusun Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, 2004, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Edisi Revisi Buku VII*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

B. JURNAL

- Atmadja, Arifin P. Soeria, “Kritik Yuridis atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara”, *Jurnal Konstitusi Volume 1 Nomor 2*, Desember 2004.

C. MAKALAH

- Asshiddiqie, Jimly, “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Makalah, Disampaikan pada Pendidikan Sespati dan Sespim Polri, Bandung, 19 April 2008.
- Asshiddiqie, Jimly, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Makalah*, Workshop tentang Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Implementasi MOU Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Penyelenggaraan Pemilukada Aceh 2011 yang Aman, Tertib, dan Damai, Jakarta, 8 Desember 2011.

D. PIDATO PENERIMAAN JABATAN GURU BESAR

Hadjon, Philipus M., “Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih”, *Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar* dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya tanggal 10 Oktober 1994.

E. LAPORAN HASIL PENELITIAN

Isra, Saldi, dkk, 2010, “Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi”, *Laporan Hasil Penelitian*, Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

F. TESIS

Mardhatillah, Siti Ruhama, 2014, “Konstitusionalitas Perluasan Kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi”, *Tesis* pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Wicaksana, Kuscahya, 2010, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Anggaran Bidang Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”, *Tesis* pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

G. PENULISAN HUKUM

Widyasari, Tira, 2015, “Reformulasi Jangka Waktu antara Rapat Permusyawaratan Hakim untuk Mengambil Putusan dengan Pembacaan Putusan pada Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, *Penulisan Hukum* pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

H. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669).

I. PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 004/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 061/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 066/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 026/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 57/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 83/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 63/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58/PUU-XV/2017.

J. INTERNET

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=2&cari=anggaran%20pendapatan> diakses pada tanggal 22 Februari 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>, diakses pada tanggal 23 Maret 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9799#.WoP5W4NubiU>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2018.